

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan identifikasi transparansi penyediaan infrastruktur publik di Kota Bandung ini adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang dibutuhkan oleh *multistakeholder* terkait transparansi infrastruktur publik, *Invormativeness* (informatif), yakni tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. *Openness* (keterbukaan) Keterbukaan informasi publik, memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi, dan terbuka mengakses data yang ada di badan publik. *Disclosure* (pengungkapan) yakni kondisi keuangan, susunan pengurus, dan Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.
2. Penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan Instrumen Standar Data Infrastruktur:
 - 1) CoST Diukur dengan 40 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 64%, yaitu berada pada interval 60.00% - 69.00% (kategori sedang). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak penyedia informasi publik tersedia setiap saat berkaitan dengan informasi infrastruktur.
 - 2) LPSE Diukur dengan 27 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 72%. yaitu berada pada interval 70.00% - 79.00%. (kategori cukup baik). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak penyedia informasi publik tersedia setiap saat berkaitan dengan informasi infrastruktur.

5.2 Implikasi

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan instrument CoST-IDS pada indikator informasi alasan untuk perubahan proyek masih tidak terbuka keseluruh publik, hanya pihak tertentu saja yang dapat mengakses hal tersebut, oleh karena itu pihak penyedia jasa konstruksi agar membuka informasi pada ranah ketika proyek terjadi perubahan.

2. Perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan instrument LPSE, masih terdapat dua indikator yang memiliki nilai rata-rata yang rendah, yaitu bobot teknis dan bobot biaya. Dengan asumsi kedua indikator tersebut informasinya tidak terbuka keseluruh publik, hanya pihak tertentu saja yang dapat mengakses hal tersebut. Oleh karena ini pihak penyedia jasa konstruksi agar membuka informasi pada kedua ranah itu ke publik, bukan pada pihak tertentu saja.
3. Diantara perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan instrument CoST-IDS yang diukur dengan 40 pertanyaan diperoleh rata-rata 64%, yaitu berada pada interval 60.00% - 69.00% (kategori sedang) lebih rendah dibandingkan dengan perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan instrument LPSE, diukur dengan 27 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 72%. yaitu berada pada interval 70.00% - 79.00% (kategori Cukup Baik). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak penyedia informasi publik tersedia setiap saat berkaitan dengan informasi infrastruktur.

5.3 Rekomendasi

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan instrument CoST-IDS dengan rata-rata tertinggi adalah pada indikator nama proyek, artinya pihak penyedia informasi publik pada aspek tersebut tersedia setiap saat. Oleh karena itu pihak penyedia jasa konstruksi diharapkan agar terus membuka informasi pada ranah tersebut dan pada ranah-ranah yang lainnya.
2. Perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi dengan instrument LPSE, dengan rata-rata tertinggi adalah pada indikator kode URP, artinya pihak penyedia informasi publik pada aspek tersebut tersedia setiap saat. Oleh karena itu pihak penyedia jasa konstruksi diharapkan agar terus membuka informasi pada ranah tersebut dan pada ranah-ranah yang lainnya.